

RENCANA KERJA

TAHUN 2025

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GROBOGAN



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 beserta perubahannya, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Tahun 2025, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan telah tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Purwodadi, 19 Maret 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. P A D M O, M.H

NIP. 19640415 199303 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, tujuan, sasaran program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dan perubahannya. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah (PD) dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD,

dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Landasan Hukum

Ladasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan adalah dokumen Perencanaan Kerja untuk 1 tahun yang mengacu pada Renstra Sekretariat Dewan tahun 2021-2026 dan berpedoman pada RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025.

Adapun Tujuan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan adalah :

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana kegiatan;
2. Untuk menjamin adanya konsistensi dalam perencanaan dan program kegiatan selama 1 tahun;
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dapat mengambil langkah - langkah atau kebijakan sesuai dengan kewenangannya masing – masing;

4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 yaitu :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Setwan tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan Setwan
- 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Setwan
- 2.4 Review terhadap rancangan RKPD

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Kerja SKPD
- 3.3 Program dan kegiatan Tahun Anggaran

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Setwan tahun lalu

Rencana kerja Sekretariat DPRD merupakan penjabaran tahunan dari Rencana strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 dan perubahannya. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 mengacu pada hasil capaian kinerja dan realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan tahun 2024.

Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan mendapatkan alokasi Anggaran untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 89.167.862.660,00 dan untuk Belanja Modal sebesar Rp. 1.679.488.100,00. Total anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebesar Rp. 90.847.350.760,00 yang terdiri dari 2 Program, 15 Kegiatan, dan 44 Sub Kegiatan. Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan mendapatkan alokasi Anggaran untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 76.302.966.290,00 dan untuk Belanja Modal sebesar Rp. 1.283.181.000,00. Total anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2023 sebesar Rp. 77.586.147.290,00 yang terdiri dari 2 Program, 15 Kegiatan, dan 42 Sub Kegiatan.

Realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 74.532.114.306,- atau sebesar 96,06 %.

Dari hasil evaluasi, pada Tahun Anggaran 2023 terdapat terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya masih sangat rendah, atau dibawah 50 % (lima puluh persen), sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi 28 % (dua puluh delapan persen).

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor terdiri dari Belanja Sewa untuk Rapat Paripmeja, kursi, sound system, dan tenda untuk Rapat paripurna yang bersifat khusus. Rendahnya realisasi dikarenakan pada Tahun 2023, tidak semua Rapat Paripurna yang bersifat khusus, memerlukan adanya sewa peralatan dan perlengkapan kantor.

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, realisasi pada tahun 2023 sebesar 20% (dua puluh persen). Masih rendahnya realisasi, dikarenakan hanya 10 (sepuluh) dari 50 (limapuluh) anggota yang memanfaatkan fasilitas medical check up.
3. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur terealisasi sebesar 35 % (tiga puluh lima persen), dan Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian terealisasi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Masih sangat rendahnya realisasi pada sub-sub kegiatan tersebut disebabkan alokasi waktu untuk pelaksanaan pengawasan dalam daerah komisi-komisi yang terbatas dikarenakan padatnya agenda kegiatan DPRD.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Sekretariat DPRD hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Sekretariat Dewan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
							Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota											
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	%	100	%	100	100	100	100,00	100	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA penetapan dan Perubahan	Dokumen	4	Dokumen	2	2	2	100,00	2	6	1,5

		tersusun										
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP dan LPPD tersusun	Dokumen	2	Dokumen	2	2	2	100,00	2	6	3
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	%	100	100	100	100,00	100	100	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Anggota DPRD tepat waktu	kali	14	kali	14	14	14	100,00	14	42	3,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	dokumen	0	Dokumen	0	1	1	100,00	0	1	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	1	Dokumen	1	1	1	100,00	1	3	3,00
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase penyelesaian dokumen administrasi	%	100	%	100	100	100	100,00	100	100	

	Daerah	kepegawain tepat waktu										
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	350	Stel	344	136	136	100,00	281	761	2,17
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	144	Orang	127	99	99	100,00	144	370	2,56
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	%	90	100	90	98,00	90	92	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	unit	12	Unit	12	1245	1220	98	1108	2340	195
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	75	Unit	69	28	28	100,00	56	153	2,04
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	unit	21300	Unit	77092	80048	79248	99	23147	179667	8,43
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	unit	5760	Unit	5870	5606	5382	96	5606	16828	2,92
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	unit	4500	Unit	4633	1607	1575	98	2500	8708	1,93

	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	641	Bulan	12	12	12	100,00	641	665	1,04
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	%	100	%	100	100	100	100,00	100	100	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Unit	20	Unit	61	106	106	100,00	127	294	14,7
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	5	Unit	5	0	0	0	22	27	5,4
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	36	Unit	19	36	36	100,00	51	106	2,94
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	%	85	100	85	81,5	100	92	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	Buah	1400	Buah	2790	3000	2970	99	12	5772	4,12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah persediaan Listrik dalam satu tahun	Kwh	240000	bulan	12	12	12	100,00	12	36	3,00

	Daya Air dan Listrik											
		Jumlah persediaan Air dalam satu tahun	M ³	10800								
		Jumlah Persediaan Internet dan langganan Video Conference dalam satu tahun	Kali	12								
		Jumlah persediaan Telepon dalam satu tahun	Kali	12								
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	12	Unit	96	3195	902	28	2	1000	83,33
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan dan kebersihan Kantor	Unit	3951	Unit	3951	969	961	99	12	4924	1,24
		Jumlah petugas kebersihan, pengemudi, dan penjaga keamanan	Orang	50	Orang	59	59	59	100,00		118	2,36
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100	%	93	100	93	100,00	100	95	
	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	Unit	12	Unit	5	5	5	100,00	5	15	1,25

	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pembayaran jasa service kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan	Unit	12	Unit	30	25	25	100,00	29	84	7,00
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Unit	5	Unit	4	4	4	100,00	4	12	2,4
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Unit	12	Unit	12	239	239	100,00	245	496	41,33
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara	Unit	2	Unit	2	2	2	100,00	1	5	2,5

1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang disahkan	%	90	%	75	100	100	100,00	100	87,5	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah peraturan yang dibahas	Rape rda	2	Rap erd a	4	2	2	100,00	2	8	4,00
	Penyelenggara an Kajian Perundang-Undangan	Frekuensi pengkajian per UU an	Kali	2	kali	1	1	1	100,00	1	3	1,5
2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas tepat waktu	%	100	%	100	100	100	100,00	100	100	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Penetapan dan Perubahan yang telah dibahas	Dok ume n	2	Do ku me n	2	2	2	100,00	2	6	3,00
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen terkait pembahasan APBD penetapan dan perubahan yang telah dibahas	Dok ume n	2	Do ku me n	2	3	3	100,00	3	8	4,00
		Terlaksananya Rapat Pembahasan APBD Luar Daerah	kali	3	-	-	3	3	100,00	3	6	2,00
2.	Pengawasan Penyelenggaan Pemerintahan	Persentase kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	%	100	%	20,75	100	57	57	100	59	
	Pengawasan Urusan	Jumlah kegiatan pengawasan yang	kali	84	kali	31	60	55	92	48	134	1,6

	Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	dilaksanakan										
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan	Kali	84	kali	8	60	21	35	48	77	0,91
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan	kali	84	kali	25	60	45	75	48	118	1,40
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan	Kali	84	kali	7	60	15	25	48	70	0.83
3.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang meningkat kapasitas dalam menjalankan tugas	%	100	%	0	100	100	100,00	100	100	
	Orientasi DPRD	Jumlah orientasi DPRD yang dilaksanakan	kali	0	kali	0	0	0	0	1	1	
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis DPRD yang dilaksanakan	Kali	6	kali	6	6	6	100,00	6	18	3,00
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan yang dimuat di website DPRD	Kali	210	kali	235	12	12	100,00	175	422	2,00

	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	7	orang	7	7	7	100,00	7	21	3,00
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah buletin, profil dan selayang pandang yang tersusun	Buku	3405	Buku	2872	1900	1881	99	6	4759	1,39
4.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan aspirasi masyarakat yang dianggarkan	%	100	%	100	100	100	100,00	100	100	
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses yang dilaksanakan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat	Kali	3	kali	3	3	3	100,00	2	8	2,67
5	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan tugas DPRD tepat waktu	%	100	%	100	100	85	85	100	87	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan kinerja DPRD yang telah tersusun	Dokumen	1	Dokumen	1	550	467	85	12	480	480

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Setwan

Capaian kinerja Pelayanan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan dapat dilihat berdasarkan tugas dan fungsinya diuraikan sebagai berikut dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2023-2024
Kabupaten Grobogan

Indikator Kinerja	Satuan	SPM / Standar Minimal	IKK	Target Renstra PD				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
Presentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP	%			100	100	100	100	100	100	100	100	
Presentase Dokumen Perencanaaa, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas	%			95	100	100	100	95	98	100	100	
Presentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan tepat waktu	%			100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian tepat waktu	%			100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%			90	100	100	100	98	80	90	100	
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	%			100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			90	100	100	100	81,5	98	100	100	
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%			93	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase Penyelesaian Layanan Keuangan dan	%			90	100	100	100	63	90	100	100	

Indikator Kinerja	Satuan	SPM / Standar Minimal	IKK	Target Renstra PD				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
Kesejahteraan sesuai SOP												
Prosentase Layanan Administrasi DPRD sesuai SOP	%			100	100	100	100	97	95	100	100	
Presentase Implementasi Tugas dan Kewajiban yang terselesaikan Sesuai SOP	%			100	100	100	100	100	100	100	100	
Presentase Perda dan Peraturan DPRD yang disahkan	%			100	90	100	100	100	100	100	100	
Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas tepat waktu	%			100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	%			100	100	100	100	57	60	70	75	
Presentase Anggota DPRD yang meningkat kapasitas dalam menjalankan tugas	%			100	100	100	100	100	100	100	100	
Presentase Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dianggarkan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase pelaksanaan tugas DPRD tepat waktu	%			100	100	100	100	85	95	100	100	
Indeks kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai			77	78	79	80	78,42	79	80	81	

Dari capaian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Sekretariat DPRD tahun 2023. Adapun Kegiatan yang belum dapat memenuhi target renstra adalah sebagai berikut :

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah, hanya tercapai 98 % dari target 100 % dikarenakan volume kebutuhan sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Penyediaan barang material lebih sedikit disbanding dengan perencanaan.

2. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dari target 100 % hanya tercapai 81,5 %. Tidak tercapainya target terutama pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor terdiri dari Belanja Sewa untuk Rapat Paripmeja, kursi, sound system, dan tenda untuk Rapat paripurna yang bersifat khusus. Rendahnya realisasi dikarenakan pada Tahun 2023, tidak semua Rapat Paripurna yang bersifat khusus, memerlukan adanya sewa peralatan dan perlengkapan kantor.
3. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, dari target 100 % hanya tercapai 63 %, hal ini disebabkan sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up dari target 100 % hanya tercapai 20 %, Masih rendahnya realisasi, dikarenakan hanya 10 (sepuluh) dari 50 (limapuluh) anggota yang memanfaatkan fasilitas medical check up.
4. Layanan Administrasi DPRD dari target 100 % hanya tercapai 97 %, hal ini dikarenakan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tanga DPRD telah sesuai dengan riilkebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD.
5. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, dari target 100 % hanya tercapai 57 %, Masih sangat rendahnya realisasi pada kegiatan tersebut disebabkan alokasi waktu untuk pelaksanaan pengawasan dalam daerah komisi-komisi yang terbatas dikarenakan padatnya agenda kegiatan DPRD.
6. Fasilitasi Tugas DPRD, dari target 100 % tercapai 85 %, sub kegiatan yang termasuk didalamnya adalah penyusunan laporan kinerja DPRD, hal ini dikarenakan jumlah rapat Dewan yang lebih kecil dari perencanaan karena padatnya kegiatan DPRD.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Setwan

Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi, uraian tugas jabatan

dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan melaksanakan fungsi, antara lain :

1. Penyusunan Program Sekretariat DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Secara organisatoris dan manajerial Sekretariat DPRD merupakan fasilitator yang menopang seluruh tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan DPRD baik bersifat rutinitas maupun terdapat dalam program dan kegiatan yang telah direncanakan. Fasilitasi yang diberikan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dilakukan mengacu pada pelayanan prima yaitu pelayanan terbaik dengan memperhatikan kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan DPRD sehingga capaian kinerja dengan hasil memuaskan. Pelayanan prima merupakan pelayanan yang berdimensi pada ketepatan waktu, kelayakan pelayanan, keramahan dan kesopanan, pelayanan yang cepat, pelayanan terhadap informasi, profesionalisme SDM dan pelayanan terkait dengan kondisi dan lingkungan tempat aktivitas akan dilaksanakan. Dalam upaya mewujudkan pelayanan prima terdapat beberapa tantangan yang

harus dihadapi oleh Sekretariat DPRD. Tantangan Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Semakin meningkatnya tuntutan untuk mencapai Good Governance dari DPRD sehingga menuntut semakin baiknya layanan yang harus diberikan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
2. Perubahan kondisi dan situasi politik yang terjadi sehingga akan mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD.
3. Tuntutan untuk meningkatkan Profesionalisme SDM pada Sekretariat DPRD
4. Peningkatan pemahaman terhadap teknologi informasi dalam menunjang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan yang professional.

Sekretariat DPRD sebagai fasilitator menyadari sepenuhnya akan hal tersebut, semua dimensi telah diupayakan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD dengan segala kemampuan yang ada. Namun demikian dalam rentang pelaksanaan fasilitasi terhadap DPRD terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang mengganggu jalan fasilitasi walaupun secara keseluruhan tidak mengganggu pelaksanaan kinerja DPRD. Beberapa isu-isu penting atau permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam melakukan fasilitasi terhadap DPRD antara lain :

1. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran di setiap bagian, selain itu masih sedikit personil di tiap bagian yang memahami pertauran perundang-undangan terkait perencanaan dan penganggaran.
2. Belum optimalnya layanan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD yang sesuai Standart pelayanan dan SOP
3. Belum optimalnya koordinasi baik dengan DPRD, antar bagian maupun dengan instansi/ dinas / Lembaga lainnya.

4. Kebutuhan ASN Sekretariat DPRD belum sesuai dengan Anjab-ABK, baik dari kuantitas maupun kualitas, selain itu juga kurang meratanya penempatan ASN pada Bagian-bagian.
5. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap semua aspek yang menunjang kinerja Sekretariat DPRD.
6. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan di Sekretariat DPRD

2.4. Review terhadap rancangan RKPD

Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap rancangan RKPD tahun 2025 dapat dilihat tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan RKPD tahun 2025 Kabupaten Grobogan

No.	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SETWAN	Persentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100	15.672.728.900	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SETWAN	Persentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100	13.487.760.700	
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang disahkan	100	603.087.700	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang disahkan	100	513.901.300	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Setwan	Jumlah dokumen hasil pembahasan Raperda	2	227.386.300	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Setwan	Jumlah dokumen hasil pembahasan Raperda	2	220.426.300	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Setwan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	1	170.095.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Setwan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	1	155.095.000	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Setwan	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1	205.606.400	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Setwan	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1	138.380.000	
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Kebijakan Anggaran yang terbahas tepat waktu	100	1.158.880.000	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Kebijakan Anggaran yang terbahas tepat waktu	100	70.300.000	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Setwan	Jumlah Dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2	41.550.000	Pembahasan KUA dan PPAS	Setwan	Jumlah Dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2	41.550.000	
	Pembahasan APBD	Setwan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	3	1.117.330.000	Pembahasan APBD	Setwan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	3	68.239.336	

No.	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	100	572.510.000	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	100	0	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Setwan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan dan hukum	48	154.960.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Setwan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan dan hukum	48	0	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Setwan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	48	134.760.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Setwan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	48	0	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Setwan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	48	148.800.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Setwan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	48	0	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Setwan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang Perekonomian	48	133.990.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Setwan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang Perekonomian	48	0	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Anggota DPRD yang meningkat kapasitas dalam menjalankan tugas	100	5.686.676.200	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Anggota DPRD yang meningkat kapasitas	100	5.403.664.400	

No.	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
								dalam menjalankan tugas			
	Pendalaman Tugas DPRD	Setwan	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6	2.769.200.000	Pendalaman Tugas DPRD	Setwan	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6	2.642.200.000	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Setwan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan	175	2.343.406.200	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Setwan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan	175	2.204.794.400	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Setwan	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	211.400.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Setwan	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	211.400.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Setwan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	6	362.670.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Setwan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	6	345.270.000	
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase penyerapan aspirasi masyarakat yang dianggarkan	100	7.273.390.000	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase penyerapan aspirasi masyarakat yang dianggarkan	100	7.205.090.000	
	Pelaksanaan Reses	Setwan	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses	3	7.273.390.000	Pelaksanaan Reses	Setwan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	3	7.205.090.000	
	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Pelaksanaan Penyusunan Kode etik DPRD	100	216.435.000	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Pelaksanaan Penyusunan Kode etik DPRD	100	133.055.000	
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Setwan	Jumlah Dokumen Kode Etik dan tata	1	216.435.000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Setwan	Jumlah Dokumen	1	133.055.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif		
			Beracara DPRD					Kode Etik dan tata Beracara DPRD				
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase pelaksanaan tugas DPRD tepat waktu	90	161.750.000	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase pelaksanaan tugas DPRD tepat waktu	90	161.750.000		
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Setwan	Jumlah laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan kinerja DPRD yang telah tersusun	12	136.750.000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Setwan	Jumlah laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan kinerja DPRD yang telah tersusun	12	136.750.000		
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Setwan	Jumlah Dokumne Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	25.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Setwan	Jumlah Dokumne Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12	25.000.000		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SETWAN	Laporan Keuangan sesuai Sap	100	89.809.572.560	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SETWAN	Laporan Keuangan sesuai Sap	100	78.662.133.195		
			Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat Daerah	100					Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat Daerah	100		
			Persentase pemenuhan area penilaian manajemen resiko	2					Persentase pemenuhan area penilaian manajemen resiko	2		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100	122.365.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran	100	83.505.000		

No.	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
						Perangkat Daerah		dan evaluasi kinerja			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Setwan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Setwan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	14.900.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Setwan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	32.815.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Setwan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	9.055.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Setwan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2	59.550.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Setwan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2	59.550.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	4.846.123.300	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	4.562.866.435	
	Penyediaan Gaji dan	Setwan	Jumlah orang yang	32	4.772.293.500	Penyediaan Gaji dan	Setwan	Jumlah orang	32	4.489.036.635	

No.	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
	Tunjangan ASN		menerima gaji dan tunjangan ASN			Tunjangan ASN		yang menerima gaji dan tunjangan ASN			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Setwan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	73.829.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Setwan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	73.829.800	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100	932.363.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100	1.221.160.410	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Setwan	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	281	180.395.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Setwan	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	281	281.951.642	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Setwan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	144	751.968.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Setwan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	144	969.208.768	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	43.823.186.900	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Umum	100	33.288.416.500	

No.	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
								Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Setwan	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1108	76.200.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Setwan	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1108	76.200.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setwan	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	56	25.693.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setwan	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	56	25.693.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Setwan	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	23417	1.329.282.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Setwan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	23417	1.168.800.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Setwan	Jumlah paket Barang Cetak yang disediakan	5606	166.469.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Setwan	Jumlah paket Barang Cetak yang disediakan	5606	119.833.600	
	Penyediaan Bahan/Material	Setwan	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	2500	198.741.900	Penyediaan Bahan/Material	Setwan	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	2500	179.069.900	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Setwan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	641	42.026.801.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Setwan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	641	31.718.820.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Penunjang Pemerintah Daerah tepat waktu	100	548.230.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	354.982.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
								Pemerintah Daerah tepat waktu			
	Pengadaan Mebel	Setwan	Jumlah paket Mebel yang disediakan	127	56.544.000	Pengadaan Mebel	Setwan	Jumlah paket Mebel yang disediakan	127	56.544.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Setwan	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	22	60.843.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Setwan	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	22	60.843.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	51	430.843.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	51	237.595.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.594.244.200	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.720.015.100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Setwan	Jumlah laporan penyediaan jasa Surat Menyurat	2500	130.890.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Setwan	Jumlah laporan penyediaan jasa Surat Menyurat	2500	110.890.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Setwan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	744.493.200	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Setwan	Jumlah persediaan listrik, Air, Internet dan telepon Dalam satu Tahun	12	814.494.100	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setwan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2	24.284.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setwan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan	2	24.284.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
								dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Setwan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	694.577.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Setwan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	770.347.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	3.399.507.100	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	3.187.322.100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Setwan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5	337.394.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Setwan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5	337.394.100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Setwan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	29	1.684.303.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Setwan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	29	1.684.303.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya	4	804.590.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah Gedung dan	4	603.790.000	

No.	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
			yang dipelihara/direhabilitasi					Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi	245	292.133.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang disediakan	245	280.748.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	Jmlah sarana dan prasarana pendukung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	1	281.087.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	Jmlah sarana dan prasarana pendukung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	1	281.087.000	
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase penyelesaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan sesuai SOP	100	32.802.087.260	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase penyelesaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan sesuai SOP	100	32.802.087.260	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Setwan	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	50	32.160.857.260	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Setwan	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	50	32.160.857.260	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Setwan	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	250	551.230.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Setwan	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	250	551.230.000	
	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Setwan	Jumlah orang yang mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	50	90.000.000	Pelaksanaan orang yang mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	Setwan	Jumlah orang yang mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	50	90.000.000	
	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD		Persentase Layanan Administrasi DPRD sesuai SOP	100	1.741.465.800	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD		Persentase Layanan Administrasi	100	1.730.575.800	

No.	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan 2025					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
								DPRD sesuai SOP			
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Setwan	Jumlah laporan hasil fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	350	241.465.800	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Setwan	Jumlah laporan hasil fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	350	230.575.800	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Setwan	Jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	48	1.500.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Setwan	Jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	48	1.500.000.000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional pada Tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

RKP Tahun 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan memperhatikan mandat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait, dokumen ini menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. RKP tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RKP tahun 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD. Arah dan kebijakan makro tahun 2025 adalah mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang diwujudkan melalui 3 (tiga) arah kebijakan prioritas pembangunan :

1. SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan

ketimpangan dan menciptakan produk-produk ramah lingkungan.

Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Isu strategis Jawa Tengah yang utama adalah tentang kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi serta pendapatan per kapita masyarakat yang masih rendah jika dibandingkan tingkat nasional dan provinsi lain, terutama di Jawa dan Bali. Isu kesejahteraan masyarakat tersebut terkait dengan isu perekonomian daerah, kualitas sumber daya manusia, keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan. Dengan memperhatikan gambaran isu tersebut, dalam RPD Tahun 2024-2026 dirumuskan isu strategis Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Selanjutnya, berdasarkan isu strategis tersebut dan tetap memperhatikan berbagai kebijakan nasional dan amanat regulasi, dengan menggunakan instrumen pohon kinerja dan cascading maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah diarahkan pada "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari". Tujuan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat sasaran daerah yaitu:

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;

3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka arah kebijakan pemabnguan daerah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2025 adalah Pemantaban daya saing SDM dan penguatan reformasi birokrasi serta pemajuan nilai-nilai budaya. Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini meliputi:

- 1) Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- 2) Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat
- 3) Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (primary health care)
- 4) Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana
- 6) Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada
- 7) Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya yang ada ke dalam berbagai sendi kehidupan baik di masyarakat maupun system pemerintahan
- 8) Peningkatan nilai-nilai toleransi dan cinta tanah air.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a) Tujuan

Adapun tujuan pelayanan Sekretariat DPRD sesuai dengan Tugas dan Fungsinya adalah :

1. Meningkatkan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Sekretariat DPRD.

b) Sasaran kerja

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;
2. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.

Adapun target kinerja tujuan dan sasaran tahun berjalan 2024 dan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Tahun 2025 Sekretariat DPRD
Kabupaten Grobogan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Capaian 2024	Target 2024
1	Meningkatkan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Hasil survei indeks kepuasan Anggota DPRD	Nilai		79
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Sekretariat DPRD	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	Skor SAKIP	Nilai SAKIP adalah hasil aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah	Nilai		B (77,7)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Capaian 2024	Target 2024
			Skor IKM	Nilai IKM adalah hasil penilaian masyarakat yang mendapatkan layanan di perangkat daerah dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan oleh KemenPAN-RB	Kategori		B (77,70)

3.3. Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran Tahun 2025

Sekretariat DPRD dalam anggaran 2025 memiliki 2 (dua) program yaitu:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- b) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Program tersebut diatas dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut ini:

No	Uraian Program/Kegiatan	Target Kinerja (%)	Pagu Anggaran
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	83.505.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	4.562.866.435
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	932.363.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	33.288.416.500
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	354.982.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.720.015.100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	3.187.322.100
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	32.802.087.260

No	Uraian Program/Kegiatan	Target Kinerja (%)	Pagu Anggaran
	Layanan Administrasi DPRD	100	1.730.575.800
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	513.901.300
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	70.300.000
	Peningkatan Kapasitas DPRD	100	5.403.664.400
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	7.205.090.000
	Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD	100	133.055.000
	Fasilitasi Tugas DPRD	100	161.750.000
JUMLAH TOTAL ANGGARAN			92.149.893.895

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan program, kegiatan serta sub kegiatan untuk rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD tahun 2025 ini mengacu yang tertuang dalam dokumen perencanaan lima tahunan (renstra) Sekretariat DPRD periode tahun 2021-2026 dan perubahan Renstra Tahun 2021-2026. Adapun program, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan disusun sebagai upaya pencapaian visi dan misi daerah sebagaimana telah tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026.

Nomenklatur yang digunakan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 202 tentang hasil verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sekretariat DPRD untuk Tahun Anggaran 2025 memiliki 2 (dua) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) Sub kegiatan.

Rincian tentang program , Kegiatan dan Sub Kegiatan tercantum dalam lampiran dibawah ini.

RENCANA KERJA TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Indikator	Rencana Tahun 2025				Catatan Peting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sekretariat DPRD									
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	%	Persentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP		100	13.487.760.700			100	13.160.900.690
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang disahkan		100	513.901.300			90	342.843.671
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pembahasan Raperda		2	220.426.300	Dana transfer Umum- DUAU		2	200.688.978
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan		1	155.095.000	Dana transfer Umum- DUAU		2	142.154.693
Penyusunan Tata tertib DPRD	Dokumen	Jumlah Dokumen Tata tertib DPRD yang disusun		1	138.380.000				
Pembahasan Kebijakan Anggaran	%	Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas tepat waktu		100	70.300.000	Dana transfer Umum- DUAU		100	995.258.365
Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS		2	41.550.000	Dana transfer Umum- DUAU		2	75.258.365
Pembahasan APBD	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD		3	68.239.336	Dana transfer Umum- DUAU		3	920.000.000
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	Persentase kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan		100	0	Dana transfer Umum- DUAU		100	1.121.204.076
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan dan hukum		48	0	Dana transfer Umum- DUAU		84	418.102.038
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur		48	0	Dana transfer Umum- DUAU		84	135.000.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Laporan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang		48	0	Dana transfer Umum- DUAU		84	150.000.000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Indikator	Rencana Tahun 2025				Catatan Peting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Kesejahteraan Rakyat		Kesejahteraan Rakyat							
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang Perekonomian		48	0	Dana transfer Umum- DAU		84	418.102.038
Peningkatan Kapasitas DPRD	%	Persentase Anggota DPRD yang meningkat kapasitas dalam menjalankan tugas		100	5.403.664.400	Dana transfer Umum- DAU		100	6.035.594.578
Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD		6	2.642.200.000	Dana transfer Umum- DAU		6	3.087.752.942
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan		175	2.204.794.400	Dana transfer Umum- DAU		210	2.500.000.000
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Orang	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		7	211.400.000	Dana transfer Umum- DAU		7	180.369.219
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat		6	345.270.000	Dana transfer Umum- DAU		2500	267.472.417
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%	Persentase penyerapan aspirasi masyarakat yang dianggarkan		100	7.205.090.000	Dana transfer Umum- DAU		100	4.500.000.000
Pelaksanaan Reses	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses		3	7.205.090.000	Dana transfer Umum- DAU		3	4.500.000.000
Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	%	Persentase Pelaksanaan Penyusunan Kode etik DPRD		100	133.055.000	Dana transfer Umum- DAU			
Penyusunan Kode Etik DPRD	Dokumen	Jumlah Dokumen Kode Etik dan tata Beracara DPRD		1	133.055.000	Dana transfer Umum- DAU			
Fasilitasi Tugas DPRD	%	Persentase pelaksanaan tugas DPRD tepat waktu		90	161.750.000	Dana transfer Umum- DAU		90	166.000.000
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Laporan	Jumlah laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan kinerja DPRD yang telah tersusun		12	136.750.000	Dana transfer Umum- DAU		28	140.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		12	25.000.000	Dana transfer Umum- DAU		14	26.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	%	Laporan Keuangan sesuai Sap		100	78.662.133.195	Dana transfer Umum- DAU		100	62.869.567.106

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Indikator	Rencana Tahun 2025				Catatan Peting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	%	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat Daerah		100		Dana transfer Umum- DAU		100	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		100	83.505.000	Dana transfer Umum- DAU		100	120.598.735
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	14.900.000	Dana transfer Umum- DAU		2	40.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2	9.055.000	Dana transfer Umum- DAU		2	36.012.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		2	59.550.000	Dana transfer Umum- DAU		2	44.586.535
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu		100	4.562.866.435	Dana transfer Umum- DAU		100	5.309.543.186
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	orang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		32	4.489.036.635	Dana transfer Umum- DAU		32	5.249.522.850
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	73.829.800	Dana transfer Umum- DAU		1	60.020.336
Administrasi Kepegawaian Perangkat	%	Persentase penyelesaian dokumen administrasi		100	1.221.160.410	Dana transfer Umum- DAU		100	1.207.555.385

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Indikator	Rencana Tahun 2025				Catatan Peting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Daerah		kepegawain tepat waktu							
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	paket	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		281	281.951.642	Dana transfer Umum- DAU		289	274.378.678
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		144	969.208.768	Dana transfer Umum- DAU		110	933.176.707
Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	33.288.416.500	Dana transfer Umum- DAU		100	36.676.282.238
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		1108	76.200.000	Dana transfer Umum- DAU		1245	85.743.337
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		56	25.693.000	Dana transfer Umum- DAU		35	154.338.007
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	paket	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		23417	1.168.800.000	Dana transfer Umum- DAU		81000	1.114.663.381
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	paket	Jumlah paket Barang Cetak yang disediakan		5606	119.833.600	Dana transfer Umum- DAU		5700	107.179.171
Penyediaan Bahan/Material	paket	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan		2500	179.069.900	Dana transfer Umum- DAU		1610	214.358.342
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		641	31.718.820.000	Dana transfer Umum- DAU		641	37.000.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu		100	354.982.000	Dana transfer Umum- DAU		100	578.858.413
Pengadaan Mebel	paket	Jumlah paket Mebel yang disediakan		127	56.544.000	Dana transfer Umum- DAU		55	142.104.148
Pengadaan Peralatan dan	unit	Jumlah unit Peralatan dan		22	60.843.000	Dana transfer		5	76.632.250

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Indikator	Rencana Tahun 2025				Catatan Peting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Mesin Lainnya		Mesin Lainnya yang diadakan				Umum- DAU			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		51	237.595.000	Dana transfer Umum- DAU		36	360.122.015
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	1.720.015.100	Dana transfer Umum- DAU		100	1.400.044.479
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa Surat Menyurat		2500	110.890.000	Dana transfer Umum- DAU		2500	143.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12	814.494.100	Dana transfer Umum- DAU		12	510.172.855
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		2	24.284.000	Dana transfer Umum- DAU		4	43.776.261
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		12	770.347.000	Dana transfer Umum- DAU		12	703.095.363
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		100	3.187.322.100	Dana transfer Umum- DAU		100	2.300.428.550
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		5	337.394.100	Dana transfer Umum- DAU		5	180.704.083
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		29	1.684.303.000	Dana transfer Umum- DAU		25	575.061.086

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Indikator	Rencana Tahun 2025				Catatan Peting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Operasional atau Lapangan									
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		4	603.790.000	Dana transfer Umum- DAU		4	754.541.366
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi		245	280.748.000	Dana transfer Umum- DAU		245	360.122.015
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	Jmlh sarana dan prasarana pendukung kantor yang dipelihara/direhabilitasi		1	281.087.000	Dana transfer Umum- DAU		2	430.000.000
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%	Persentase penyelesaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan sesuai SOP		100	32.802.087.260	Dana transfer Umum- DAU		100	904.338.007
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Orang/bulan	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD		50	32.160.857.260	Dana transfer Umum- DAU		50	30.010.168
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	paket	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan		250	551.230.000	Dana transfer Umum- DAU		300	750.000.000
Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Orang	Jumlah orang yang mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD		50	90.000.000	Dana transfer Umum- DAU		50	124.327.839
Layanan Administrasi DPRD	%	Persentase Layanan Administrasi DPRD sesuai SOP		100	1.730.575.800	Dana transfer Umum- DAU		100	1.880.122.015
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	laporan	Jumlah laporan hasil fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		350	230.575.800	Dana transfer Umum- DAU		350	360.122.015
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	paket	Jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan		48	1.500.000.000	Dana transfer Umum- DAU		41534	1.500.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan. Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD tahun 2025. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 ini.

Purwodadi, 19 Maret 2024

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN GROBOGAN



Drs F A D M O, M.H

NIP. 19640415 199303 1 008